



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PEMBERIAN OPINI AUDIT WAJAR
DENGAN PENGECEUALIAN PADA LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020-2023**

Oleh:

Farhan

2110533037

Dosen Pembimbing:

Dr. Hamdani, MM, M.Si, Ak, CA

***Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak)***

PADANG

2025

	No. Alumni	FARHAN	No. Alumni
	Universitas		Fakultas
BIODATA a). Tempat/Tanggal Lahir: Padang/04 September 2001 b). Nama Orang tua: Feri Frengky dan Marnis c). Fakultas: Ekonomi dan Bisnis d). Departemen: Akuntansi e). No. BP 2110533037 f). Tanggal Lulus: 10 Maret 2025 g). Predikat Lulus: Dengan Pujian h). IPK: 3.54 i). Lama Studi: 3 Tahun 7 Bulan j). Alamat Orang tua: Jalan Perjuangan VII Nomor 5, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat.			
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB OPINI WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN PADA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020-2023 Skripsi Oleh: Farhan Dosen Pembimbing: Dr. Hamdani, MM., M.Si., Ak., CA. ABSTRACT <i>Accountability and transparency of state financial management are fundamental cornerstones in building good governance. Weak governance in Indonesia is one of the main factors leading to rampant corrupt practices. Case studies in the Advanced Indonesia Cabinet period show that weaknesses in the system of supervision, transparency, and accountability have created opportunities for officials to commit corruption. The research uses a qualitative method with a case study approach. The object of research is a corruption case in the procurement of 4G BTS, one of the suspects is the former Minister of Communication and Information Technology. The type of data used is secondary data in the form of LHP KemenKominfo 2020-2023 and the suspect's Court Decision. The process of recording and reporting several items related to fixed asset accounts of equipment and machinery, construction in progress, and prepaid expenditures has not been fully reported and presented in accordance with Government Accounting Standards and related governing regulations. The total state loss predicted by BPK is Rp 9,436,344,775,313 which is the value of the affected 4G BTS assets. Meanwhile, according to the calculation of the Financial and Development Audit Agency (BPKP), the state suffered a loss of IDR 8,032,084,133,795.51 which has been sounded in court decision Number 3448 K/Pid.Sus/2024. The financial statements for 2020 and 2021 received an unqualified opinion. This is wrong and inappropriate because for the 2021 financial statements, indications of corruption cases have begun to be detected, marked by the existence of overpayments in package contracts 1, 3, and 5 in the procurement of the provision of Batch 1 4G BTS worth 18,755,350,111, this shows the failure of auditors to assess and examine the 2021 Financial Statements of the Ministry of Communication and Information.</i> Keywords: Transparency. Corruption. Audit. KemKominfo			

ABSTRAK

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara menjadi landasan fundamental dalam membangun tata kelola (good governance) pemerintahan yang baik. Lemahnya tata kelola pemerintahan di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya praktik korupsi. Studi kasus pada periode Kabinet Indonesia Maju menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas telah menciptakan peluang bagi para pejabat untuk melakukan korupsi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian berupa kasus korupsi pengadaan BTS 4G yang salah satu tersangkanya adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa LHP KemenKominfo Tahun 2020-2023 dan Putusan Pengadilan tersangka. Proses pencatatan dan pelaporan atas beberapa pos terkait dengan akun aset tetap peralatan dan mesin, Konstruksi dalam pengerjaan, dan belanja dibayar dimuka belum sepenuhnya dilaporkan dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan terkait yang mengatur. Total kerugian negara yang diprediksi BPK senilai Rp 9.436.344.775.313 yang merupakan nilai aset BTS 4G yang terdampak. Sedangkan menurut perhitungan Badan Pemeriksaan keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa negara mengalami kerugian senilai Rp 8.032.084.133.795,51 yang telah dibunyikan dalam putusan pengadilan Nomor 3448 K/Pid.Sus/2024. Laporan keuangan tahun 2020 dan 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini keliru dan tidak tepat dikarenakan untuk laporan keuangan tahun 2021 sudah mulai terdeteksi adanya indikasi kasus tindak pidana korupsi yang ditandai dengan adanya kelebihan pembayaran pada kontrak paket 1,3, dan 5 pada pengadaan penyediaan BTS 4G Batch 1 senilai 18.755.350.111 hal ini menunjukkan adanya kegagalan auditor dalam menilai dan memeriksa Laporan Keuangan Kemkominfo Tahun 2021.

Kata Kunci: Transparansi. Korupsi. Audit. KemKominfo

